

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERPADU BERBASIS
KLASTER DI KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

ABSTRAK

Nur Latifa Pohan, 2110843021, *Collaborative Governance* dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Berbasis Klaster di Kabupaten Pelalawan, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. 2025. Dibimbing oleh: Roza Liesmana, S. IP, M. Si dan Drs. Yoserizal, M. Si. Skripsi ini terdiri dari 214 halaman dengan 5 buku teori, 6 buku metode, 8 jurnal, 4 skripsi, 3 internet dan 8 dokumen.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah yang rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kabupaten Pelalawan membentuk Kelompok Kerja Klaster (Pokja Klaster) sebagai upaya kolaboratif dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan, TNI Komando Distrik 0313/KPR, Kepolisian Resor Kabupaten Pelalawan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pelalawan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan, serta pihak swasta yang diwakilkan oleh PT Gandaerah Hendana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, sementara keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Kerangka teori yang digunakan adalah *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash, yang mencakup empat variabel utama yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash, namun belum berjalan optimal. Dilihat dari variabel kondisi awal, dalam kolaborasi ini masyarakat belum dilibatkan secara formal dalam Pokja Klaster, sehingga melemahkan prinsip inklusivitas. Selain itu, pembagian peran antar anggota Pokja Klaster belum jelas, terutama peran Pemerintah Daerah yang masih bersifat konvensional. Kontribusi perusahaan swasta terlihat lebih dominan, terutama dalam memberikan insentif, sementara Pemerintah Daerah kerap terkendala anggaran. Ketimpangan ini berpotensi mengganggu keberlanjutan kolaborasi. Dari variabel desain kelembagaan, belum adanya forum tetap serta sistem evaluasi dan monitoring bersama dapat memperlemah koordinasi dan transparansi. Di lapangan, kolaborasi telah mencakup tahap pencegahan, penanggulangan, dan pasca-penanggulangan. Namun demikian, keberadaan kolaborasi ini telah memberikan hasil positif. Respons terhadap kebakaran menjadi lebih cepat dan area kebakaran cenderung menurun dibandingkan sebelum kolaborasi terbentuk, meskipun hasilnya masih fluktuatif.

Kata Kunci: Kolaborasi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kabupaten Pelalawan

ABSTRACT

Nur Latifa Pohan, 2110843021, Collaborative Governance in Cluster-Based Integrated Land and Forest Fire Control in Pelalawan Regency, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Padang. 2025. Supervised by: Roza Liesmana, S. IP, M. Si and Drs. Yoserizal, M. Si. This thesis consists of 214 pages with 5 theory books, 6 method books, 8 journals, 4 theses, 3 internet and 8 documents.

This thesis is based on Pelalawan regency being a vulnerable area for forest and land fires. To overcome this, Pelalawan formed a cluster Working Group (Pokja Klaster) as a collaborative effort in controlling forest and land fires consisting of the Pelalawan Regional Disaster Management Agency, TNI District Command 0313/KPR, Pelalawan regency resort police, Pelalawan regency Fire and Rescue Service, Pelalawan regency Plantation and Livestock Service, Pelalawan regency Environment Service, and private parties represented by PT Gandaerah Hendana.

This study uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collected through interviews, observations and documentation. Informants were selected using purposive sampling techniques, while the validity of the data is done by triangulating the source. The theoretical framework used is Collaborative Governance from Ansell and Gash, which includes four main variables, namely initial conditions, institutional design, facilitative leadership and collaboration processes.

The results showed that the collaboration of forest and land fire control in Pelalawan is in accordance with the theory of collaborative governance from Ansell and Gash, but has not run optimally. Judging from the initial condition variables, in this collaboration, the community has not been formally involved in the cluster Working Group, thus weakening the principle of inclusiveness. In addition, the distribution of roles among cluster Working Group members is not clear, especially the role of local governments that are still conventional. The contribution of private companies is seen to be more dominant, especially in providing incentives, while local governments are often constrained by budgets. This inequality has the potential to disrupt the sustainability of collaboration. From institutional design variables, the absence of a permanent forum and a joint evaluation and monitoring system can weaken coordination and transparency. On the ground, collaboration has covered prevention, countermeasures, and post-countermeasures. Nevertheless, the existence of this collaboration has given positive results. The response to fires is faster and the fire area tends to decrease compared to before the collaboration was formed, although the results are still volatile.

Keywords: Collaboration, Land and Forest Fires, Pelalawan Regency